Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 54-65
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Keterkaitan, Penyebab, Dampak, dan Strategi Penanganan Terintegrasi (Studi Literatur)

Christine Rambing, Dian Noventi, Farida Muniroh, Uu Fahrullah, Lintank Veralianty, Diah Pratiwi, Syamsi Akbaridno, Risita Robi, Imelia Agustin, Mochamad Yanuar Siswanto, Sri Hapsari*
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI Jakara
christinerambing77@gmail.com*, diannoventi@gmail.com, faridamuniroh24@gmail.com, uu.fahrulloh@gmail.com, lintankvp@gmail.com, diahpratiwiiii12@gmail.com, syamsiakbar89@gmail.com, robiyaris79@gmail.com, imeliaa15@gmail.com, tyan.mangkubumi@gmail.com, *srihapsari112@gmail.com

Abstrak

Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan pembangunan yang belum tuntas di Indonesia, sementara kajian empiris tentang hubungan keduanya menghasilkan temuan yang beragam dan tersebar. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan pengangguran dan kemiskinan, mengidentifikasi penyebab serta dampaknya, dan merumuskan strategi penanganan terintegrasi bagi wilayah perkotaan dan perdesaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terbitan 2021–2026 ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, dan DOAJ. Data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis) dan sintesis tematik (thematic synthesis), dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan hasil. Hasil telaah menunjukkan bahwa kedua masalah tersebut saling memperkuat dalam siklus dua arah. Kekuatan hubungannya ditentukan oleh kualitas modal manusia, informalitas pasar kerja, intensitas guncangan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar. Penyebabnya berlapis, meliputi pertumbuhan angkatan kerja, ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch), otomasi, dan ketimpangan wilayah, dengan dampak pada pendidikan, gizi, dan kemiskinan antargenerasi. Strategi penanganan perlu disusun bertahap menurut horizon jangka pendek, menengah, dan panjang, mencakup perlindungan sosial, peningkatan kompetensi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perluasan lapangan kerja formal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum memadai sebagai ukuran keberhasilan kebijakan, sehingga mutu pekerjaan dan kecukupan pendapatan perlu dijadikan indikator utama.

Kata kunci: Pengangguran, Kemiskinan, Keterkaitan, Strategi Penanganan Terintegrasi

Abstract

Unemployment and poverty remain unresolved development challenges in Indonesia, while empirical studies examining their relationship have produced diverse and fragmented findings. This study aims to analyze the relationship between unemployment and poverty, identify their causes and impacts, and formulate integrated management strategies for urban and rural areas. The research employs a qualitative approach using a literature review design. Secondary data, including scientific journal articles, books, and official publications from Statistics Indonesia (BPS) published between 2021 and 2026, were retrieved through Google Scholar, Garuda, and DOAJ. The collected data were analyzed using content analysis and thematic synthesis, with source triangulation applied to ensure the validity of the findings. The results indicate that unemployment and poverty mutually reinforce each other through a bidirectional cycle. The strength of this relationship is influenced by human capital quality, labor market informality, the intensity of economic shocks, and access to basic services. The underlying causes are multidimensional, including labor force growth, skills mismatch, automation, and regional inequalities, with consequences for education, nutrition, and intergenerational poverty. Management strategies should be developed progressively across short-, medium-, and long-term periods, encompassing social protection, competency development, strengthening Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and expanding formal employment opportunities. The Open Unemployment Rate alone is insufficient to measure policy effectiveness; therefore, job quality and income adequacy should serve as primary evaluation indicators.

Keywords: Unemployment, Poverty, Interrelationship, Integrated Management Strategies

1. Pendahuluan

Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan pembangunan yang belum tuntas di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin pada September 2025 berjumlah 23,36 juta jiwa atau 8,25 persen,

dengan kemiskinan perdesaan (10,72 persen) jauh melampaui perkotaan (6,60 persen) (Badan Pusat Statistik, 2026). Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,74 persen, setara 7,35 juta orang dari 155,27 juta angkatan kerja. Angka tersebut tampak membaik, tetapi belum mencerminkan kualitas pekerjaan dan kecukupan pendapatan rumah tangga. Kemiskinan sendiri merupakan fenomena multidimensi sehingga tidak cukup dipahami sebagai rendahnya pendapatan semata (Resina et al., 2023). Hilangnya sumber penghasilan akibat pengangguran melemahkan daya beli, membatasi akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menyempitkan peluang peningkatan keterampilan. Kondisi ini membuat rumah tangga rentan terperangkap dalam kemiskinan antargenerasi. Ketidaksesuaian keterampilan (*skills mismatch*) memperberat situasi tersebut. Sekitar sepertiga pekerja muda Indonesia menempati pekerjaan yang tidak sepadan dengan jenjang pendidikannya, dan hal ini berkaitan dengan produktivitas serta pendapatan (Putranto & Natalia, 2024).

Gambaran tersebut perlu dibaca bersama dinamika beberapa tahun sebelumnya. Pada 2023, tingkat kemiskinan nasional tercatat 9,36 persen atau sekitar 25,90 juta jiwa. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih memperlihatkan belum meratanya kapasitas ekonomi antarwilayah (Aulia & Dewi, 2025). Tingkat tersebut bahkan masih lebih tinggi daripada kondisi sebelum pandemi pada 2019, sehingga pemulihan belum sepenuhnya tuntas (Sari & Fatimah, 2025). Kenyataan ini menunjukkan bahwa penurunan persentase kemiskinan dan pengangguran tidak selalu berarti membaiknya kualitas penghidupan rumah tangga. Guncangan ekonomi dapat memutus pendapatan secara mendadak, sehingga kelompok yang berada tepat di atas garis kemiskinan mudah terdorong kembali ke bawahnya. Selain itu, kualitas hasil pendidikan turut menentukan siapa yang mampu bertahan di pasar kerja. Kelompok usia muda, misalnya, menghadapi hambatan yang berlainan menurut jenjang pendidikannya, sehingga angka pengangguran agregat menyembunyikan penyebab yang beragam (Dewi et al., 2026). Dengan latar demikian, pembahasan pengangguran dan kemiskinan tidak cukup berhenti pada angka agregat. Pembahasan perlu menelusuri mekanisme yang menghubungkan keduanya, termasuk peran informalitas, ketidaksesuaian keterampilan, dan efektivitas program pemerintah.

Kajian empiris tentang keterkaitan kedua masalah ini menghasilkan temuan yang beragam. Analisis periode 2007–2022 menunjukkan bahwa pengangguran dan inflasi sama-sama meningkatkan kemiskinan secara signifikan, dan keduanya bersama-sama menjelaskan 87,6 persen variasinya (Simanungkalit, 2023). Hasil serupa dilaporkan oleh (Zaqiah et al., 2023), yakni pengangguran berpengaruh positif signifikan, sedangkan pendidikan berpengaruh negatif signifikan. Sebaliknya, analisis tahun 2000–2023 dengan *error correction model* menemukan pengaruh pengangguran yang negatif dan tidak signifikan, sementara PDB signifikan menurunkan kemiskinan (Cindana & Sa, 2025). Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa pengaruh pengangguran bergantung pada konteks, periode, dan karakteristik wilayah. Dari sisi spasial, data panel 2013–2023 memperlihatkan bahwa pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan perkotaan, tetapi memperburuk kemiskinan perdesaan. Pertumbuhan ekonomi efektif menekan kemiskinan kota, sedangkan zakat dan Dana Desa lebih berperan di desa (Alamsyah et al., 2026).

Keberagaman temuan tersebut berlanjut pada kajian regional yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian atas 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2022–2024 menunjukkan bahwa pendidikan berhubungan negatif dan signifikan dengan kemiskinan, pengangguran berhubungan positif dan signifikan, sedangkan upah minimum hanya berarah negatif tanpa signifikansi statistik (Wardani & Rachmawati, 2026). Studi lain di provinsi yang sama, dengan variabel yang lebih ringkas, melaporkan bahwa pengangguran dan upah minimum sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan (Syahputri & Fisabilillah, 2022). Perbedaan arah koefisien upah minimum pada dua penelitian di wilayah yang sama menandakan bahwa hasil estimasi sangat bergantung pada periode pengamatan, spesifikasi model, dan struktur pasar kerja setempat. Temuan yang lebih sulit ditafsirkan muncul pada enam provinsi di Pulau Jawa periode 2017–2021, tempat pengangguran justru berhubungan negatif dengan kemiskinan (Dakhilullah, 2023). Pada skala nasional, data 34 provinsi tahun 2018–2022 menunjukkan bahwa tingginya pengangguran dan rendahnya upah minimum regional sama-sama mendorong kemiskinan (Samosir et al., 2025). Peneliti lain mencatat bahwa kajian mengenai pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk menganggur terhadap kemiskinan masih menyisakan perbedaan fokus sehingga memerlukan penelaahan lanjutan (Deswari et al., 2023). Studi paling baru di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2018–2024 pun masih menguji kombinasi pengangguran, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan penduduk sebagai determinan kemiskinan (Fitri & Cahyono, 2026). Cakupan penelitian-penelitian itu sangat bervariasi, mulai dari satu tahun pengamatan hingga tujuh tahun, dan dari tingkat provinsi hingga seluruh Indonesia, sehingga perbandingan langsung antarhasil sulit dilakukan. Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan pengangguran dan kemiskinan tidak dapat dibaca sebagai relasi tunggal yang seragam di semua tempat. Karena itu, sintesis lintas studi yang memperhatikan konteks wilayah, periode, dan struktur ketenagakerjaan menjadi kebutuhan analitis yang nyata.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keragaman hasil tersebut tidak semata-mata menandakan ketidakkonsistenan teori. Perbedaan itu juga mencerminkan cara peneliti mendefinisikan dan mengukur variabel. Sebagian studi menjadikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai satu-satunya ukuran, padahal indikator ini hanya menangkap penduduk yang sama sekali tidak bekerja. Pekerja berpenghasilan rendah di sektor informal tidak terwakili oleh indikator tersebut. Akibatnya, koefisien pengangguran dapat tampak lemah, tidak signifikan, bahkan bertanda negatif (Cindana & Sa, 2025). Perbedaan unit analisis memperlebar jarak antarhasil. Studi tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan nasional beroperasi pada tingkat agregasi yang berlainan dengan periode pengamatan yang tidak sama. Data 34 provinsi menunjukkan bahwa pengangguran dan upah minimum regional yang rendah sama-sama mendorong kemiskinan (Samosir et al., 2025), sedangkan data enam provinsi di Pulau Jawa memberi gambaran yang berbeda (Dakhilullah, 2023). Kenyataan ini menegaskan bahwa kesimpulan dari satu wilayah tidak otomatis berlaku di wilayah lain. Telaah yang menyatukan temuan lintas konteks dengan demikian menjadi landasan untuk menarik pelajaran kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sisi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai *conditional cash transfer* berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Resina et al., 2023). Pendidikan vokasi juga terbukti menurunkan peluang *undereducation*, dan pekerja dengan pekerjaan yang sepadan berpeluang lebih besar memperoleh pendapatan layak. Dimensi lain yang kian mendapat sorotan adalah informalitas pasar kerja. Analisis data panel 34 provinsi periode 2019–2023 dengan *fixed effect model* menunjukkan bahwa pekerja informal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Aulia & Dewi, 2025). Pola serupa tampak di Nusa Tenggara Timur, tempat jumlah pekerja sektor informal berhubungan positif dan signifikan dengan kemiskinan, sedangkan upah pekerja informal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Perseveranda, 2025). Kesamaan hasil pada dua tingkat wilayah ini memberi dasar untuk menempatkan informalitas sebagai variabel kunci, bukan sekadar pelengkap, dalam menjelaskan kemiskinan. Dari sisi intervensi, evaluasi pelatihan Kartu Prakerja pada tingkat desa menyimpulkan bahwa program tersebut belum efektif meningkatkan produktivitas pesertanya (Taufiq & Akhmadi, 2022). Pada program bantuan tunai bersyarat, penelitian terhadap 80 penerima Program Keluarga Harapan di sebuah desa di Kabupaten Kampar menaksir bahwa pelaksanaan program menyumbang 38,6 persen terhadap penanggulangan kemiskinan setempat (Prihatin et al., 2024). Kedua contoh ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan berbeda menurut jenis program dan lokasi pelaksanaannya. Penilaian atas strategi penanganan karenanya perlu dilakukan secara kontekstual dan berbasis bukti.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya menguji pengaruh parsial satu atau dua variabel makroekonomi terhadap kemiskinan dengan hasil yang belum konsisten. Pembahasan mengenai penyebab, dampak, dan strategi penanganan tersebar pada studi yang terpisah, sehingga jarang dirangkai dalam satu kerangka yang menghubungkan pengangguran, kualitas pekerjaan, pendapatan, dan akses layanan dasar. Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada sintesis literatur terintegrasi yang memandang pengangguran dan kemiskinan sebagai siklus yang saling memperkuat, membedakan karakteristik perkotaan dan perdesaan, serta menyusun strategi penanganan menurut horizon waktu jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, apa saja faktor penyebab dan dampak yang menyertainya, serta bagaimana strategi penanganan terintegrasi yang sesuai bagi wilayah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, serta merumuskan strategi penanganan terintegrasi berdasarkan telaah literatur. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi ketenagakerjaan dan pembangunan melalui kerangka konseptual yang memadukan aspek pasar kerja, pendapatan, dan perlindungan sosial. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan berbasis data yang mengaitkan peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, dan jaminan sosial secara selaras.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur untuk menelaah keterkaitan, penyebab, dampak, dan strategi penanganan pengangguran serta kemiskinan di Indonesia. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian menuntut penyintesisan temuan dari berbagai kajian yang sudah ada, bukan pengumpulan data lapangan (Creswell & Creswell, 2023). Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu artikel jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai ketenagakerjaan dan kemiskinan. Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui basis data seperti Google Scholar, Garuda, dan DOAJ dengan kata kunci "pengangguran", "kemiskinan", "strategi penanganan", *unemployment*, dan *poverty* yang dikombinasikan dengan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

operator Boolean. Penelusuran yang terencana ini menjaga agar proses pencarian dapat ditelusuri ulang dan tidak bergantung pada pilihan subjektif peneliti (Booth et al., 2022). Seleksi sumber dilakukan bertahap melalui pemeriksaan judul, abstrak, dan teks lengkap.

Kriteria inklusi meliputi publikasi tahun 2021–2026, berfokus pada konteks Indonesia, relevan dengan variabel penelitian, dan dapat diakses secara penuh. Sumber yang duplikat, tidak relevan, atau tidak memiliki identitas publikasi yang jelas dikeluarkan. Kualitas sumber dinilai dari kejelasan metode, keterbaruan data, serta reputasi penerbit atau jurnal (Booth et al., 2022). Analisis data memakai analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik (*thematic synthesis*) melalui tiga langkah. Pertama, reduksi data dengan mengekstraksi informasi pokok dari setiap sumber, seperti tujuan, metode, dan temuan. Kedua, pengelompokan temuan ke dalam tema keterkaitan, penyebab, dampak, dan strategi penanganan. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan temuan antarsumber, termasuk antara wilayah perkotaan dan perdesaan (Creswell & Creswell, 2023). Keabsahan hasil dijaga melalui triangulasi sumber, yakni menyandingkan temuan jurnal dengan data resmi BPS (Booth et al., 2022).

Pendekatan studi literatur membawa konsekuensi yang perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, mutu simpulan bergantung pada kualitas dan keragaman sumber yang berhasil dijaring, sehingga temuan tidak dapat dilepaskan dari cakupan basis data dan rentang tahun yang ditetapkan. Kedua, studi yang ditelaah memakai desain, periode, dan tingkat analisis yang berlainan. Perbandingan antarsumber karena itu dilakukan secara kualitatif dan tematik, bukan dengan menggabungkan besaran koefisien secara statistik. Ketiga, sebagian tafsir dalam pembahasan, terutama penjelasan atas perbedaan arah hasil, merupakan inferensi penulis dan ditandai secara eksplisit agar pembaca dapat membedakannya dari temuan sumber primer. Langkah ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam penelusuran yang sistematis (Booth et al., 2022). Pemilihan desain kualitatif tetap relevan karena tujuan penelitian ialah merumuskan kerangka konseptual dan strategi, bukan menaksir besar pengaruh suatu variabel (Creswell & Creswell, 2023). Penyandingan dengan data resmi BPS berfungsi sebagai jangkar empiris agar sintesis tidak berhenti pada tataran argumentatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Keterkaitan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia

Data resmi menunjukkan bahwa kedua masalah ini belum terlepas satu sama lain. Pada Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,74 persen, setara 7,35 juta penganggur dari 155,27 juta angkatan kerja. Penduduk miskin berkurang dari 23,36 juta jiwa (8,25 persen) pada September 2025 menjadi 22,93 juta jiwa (8,07 persen) pada Maret 2026. Kemiskinan perdesaan (10,67 persen) tetap jauh di atas perkotaan (6,34 persen) meskipun angka nasional menurun. Hubungan keduanya berlangsung dua arah. Penelitian dengan *Vector Autoregression* pada data 34 provinsi tahun 2010–2024 membuktikan kausalitas timbal balik yang signifikan pada taraf 5 persen melalui uji *Granger Causality* (Syaifullah & Siregar, 2026). Hasil *Impulse Response Function* menunjukkan bahwa tambahan satu poin persentase pengangguran menaikkan kemiskinan 0,42 poin pada tahun pertama. Dampak itu memuncak 0,68 poin pada tahun ketiga dan masih terasa pada tahun kelima. Mekanisme ini membentuk siklus enam tahap.

Pengangguran menggerus pendapatan keluarga, akses pendidikan dan layanan dasar menyempit, kesempatan meningkatkan keterampilan berkurang, produktivitas turun, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan pengangguran kembali bertambah. Pengaruh pengangguran bekerja secara langsung lewat hilangnya penghasilan, dan secara tidak langsung lewat melemahnya daya beli, terbatasnya pendidikan, serta ketimpangan sosial (Nurhikm & Riofita, 2026). Kemiskinan bersifat multidimensi, sehingga cakupannya meluas hingga akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan jaringan sosial (Sesmita et al., 2025). Kekuatan hubungan tersebut ternyata bergantung pada cara pengukurannya. Penelitian periode 2013–2022 tidak menemukan pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan, tetapi menemukan pengaruh negatif kesehatan dan pengaruh positif ketimpangan pendapatan (Aryanti & Sukardi, 2024). Studi lain menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhubungan negatif signifikan dengan kemiskinan, sedangkan inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh besar secara parsial (Sinurat, 2023).

Pada data panel 2018–2022, bantuan sosial berpengaruh positif signifikan, pendidikan dan TPT tidak signifikan, tetapi ketiganya berpengaruh secara bersama-sama (Aliyah & Bahtiar, 2025). Ketidakkonsistenan ini wajar sebab TPT hanya menghitung orang yang sama sekali tidak bekerja, sedangkan banyak rumah tangga miskin tetap

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

bekerja pada pekerjaan informal berpenghasilan rendah. Kunci pemutusan siklus terletak pada kecukupan pendapatan dari pekerjaan, bukan sekadar status bekerja. Tanda positif bantuan sosial pun lebih masuk akal dibaca sebagai akibat penyaluran bantuan ke daerah miskin (*reverse causality*), dan tafsir ini perlu diuji lebih lanjut.

Telaah lintas studi memperlihatkan bahwa keterkaitan pengangguran dan kemiskinan tidak berlangsung secara langsung semata, tetapi bergantung pada kualitas manusia dan struktur kesempatan kerja. Dalam analisis 34 provinsi, IPM bertindak sebagai variabel perantara yang memperkuat pengaruh pengangguran dan rendahnya upah minimum regional terhadap kemiskinan, sehingga kualitas pembangunan manusia menjadi jembatan antara kehilangan pekerjaan dan kerentanan ekonomi (Samosir et al., 2025). Dalam siklus enam tahap yang telah diuraikan sebelumnya, peran IPM tersebut dapat dipahami sebagai simpul yang menghubungkan melemahnya pendapatan dengan menyempitnya akses pendidikan dan kesehatan. Kerangka *vicious circle of poverty* pada penelitian di Jawa Timur menjelaskan simpul itu dengan lugas. Pendidikan yang rendah menekan produktivitas dan pendapatan, pendapatan yang rendah membatasi investasi pada pendidikan generasi berikutnya, dan lingkaran tersebut bertahan tanpa intervensi yang memadai (Wardani & Rachmawati, 2026).

Selain itu, perhatian perlu bergeser dari jumlah penganggur ke mutu pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat sementara, berupah rendah, dan tanpa perlindungan sosial tidak cukup untuk mengeluarkan rumah tangga dari kemiskinan walaupun anggotanya tercatat bekerja (Wardani & Rachmawati, 2026). Pembacaan ini sejalan dengan kenyataan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya menangkap sebagian persoalan. Ia juga membantu menjelaskan mengapa estimasi upah minimum berubah arah antarstudi. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan pada satu studi di Jawa Timur (Syahputri & Fisabilillah, 2022), tetapi tidak berpengaruh pada enam provinsi di Pulau Jawa (Dakhilullah, 2023). Hasil yang berlawanan dengan teori, seperti hubungan negatif pengangguran dengan kemiskinan yang telah disebut pada pendahuluan, lazim muncul ketika indikator pengangguran terbuka dipakai tanpa memperhitungkan penduduk miskin yang tetap bekerja pada pekerjaan berpenghasilan rendah. Penafsiran ini merupakan inferensi penulis atas pola temuan dan masih perlu diuji dengan data mikro.

Pengaruh guncangan eksternal juga patut diperhitungkan. Pandemi *Covid-19* terbukti menambah jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa (Dakhilullah, 2023). Pada periode yang sama, proporsi pekerja informal naik menjadi 60,47 persen pada 2020, atau 4,59 persen lebih tinggi dibandingkan 2019 (Aulia & Dewi, 2025). Ketika permintaan tenaga kerja formal menyusut, rumah tangga cenderung berpindah ke pekerjaan informal yang rentan. Relasi pengangguran dan kemiskinan pun berubah wujud dari "tidak bekerja" menjadi "bekerja tetapi miskin". Dalam kerangka ini, kenaikan kemiskinan pascaguncangan tidak selalu tercermin pada kenaikan TPT, dan pemantauan kebijakan perlu menyertakan indikator kualitas pekerjaan.

Perbedaan perkotaan dan perdesaan memperkaya gambaran tersebut. Analisis tingkat nasional menemukan bahwa pendapatan bersih pekerja bebas di perdesaan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan di perkotaan tidak, karena akses terhadap fasilitas sosial dan ekonomi di kota membantu mereka menanggung biaya hidup yang tinggi (Sari & Fatimah, 2025). Temuan ini konsisten dengan data resmi pada awal pembahasan yang memperlihatkan kemiskinan perdesaan jauh melampaui perkotaan. Pada skala kabupaten, penelitian terhadap 29 kabupaten di Jawa Tengah periode 2017–2023 menunjukkan bahwa dana desa dan IPM sama-sama berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Prastowo & Saputra, 2026). Dengan demikian, ketersediaan sumber daya desa dan kualitas manusia merupakan bagian dari penjelasan mengapa kemiskinan perdesaan lebih sulit diturunkan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur lain yang menentukan arah hubungan tersebut. Pada studi di Jawa Timur, produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pengangguran, upah minimum, dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama berpengaruh signifikan (Syahputri & Fisabilillah, 2022). Pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk menganggur sendiri diposisikan sebagai dua variabel makroekonomi utama yang berkorelasi dengan kemiskinan di Indonesia (Deswari et al., 2023). Namun, pertumbuhan hanya akan menurunkan kemiskinan apabila menghasilkan kesempatan kerja yang luas dan stabil. Pertumbuhan yang terpusat pada sektor tertentu cenderung tidak dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah.

Prinsip kehati-hatian perlu dijaga dalam menafsirkan literatur ini. Studi tingkat desa yang hanya melibatkan 80 responden, misalnya, memberi gambaran kontekstual dan belum dapat digeneralisasi ke tingkat nasional (Prihatin et al., 2024). Sebagai sintesis, keterkaitan pengangguran dan kemiskinan paling tepat dipahami sebagai hubungan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

bersyarat yang kekuatannya ditentukan oleh kualitas modal manusia, informalitas pasar kerja, intensitas guncangan, dan akses layanan di wilayah masing-masing. Pemutusan siklus karenanya menuntut intervensi yang menyentuh seluruh simpul tersebut sekaligus, bukan hanya penciptaan lowongan kerja.

Apabila seluruh temuan di atas dibaca berdampingan, terdapat tiga sumber yang menjelaskan mengapa hasil estimasi berbeda-beda. Sumber pertama ialah pengukuran. Studi periode 2013–2022 tidak menemukan pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan, tetapi menemukan pengaruh kesehatan dan ketimpangan pendapatan (Aryanti & Sukardi, 2024). Studi lain menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhubungan signifikan dengan kemiskinan, sedangkan inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh besar secara parsial (Sinurat, 2023). Kedua temuan ini menandakan bahwa pengangguran terbuka hanyalah satu dari beberapa dimensi kerentanan rumah tangga. Sumber kedua ialah spesifikasi model. Bantuan sosial, pendidikan, dan TPT tidak seluruhnya signifikan secara parsial, tetapi ketiganya berpengaruh secara simultan (Aliyah & Bahtiar, 2025). Pengaruh masing-masing variabel dengan demikian baru terlihat jelas bila dibaca sebagai satu gugus. Sumber ketiga ialah wilayah. Pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan perkotaan tetapi memperburuk kemiskinan perdesaan (Alamsyah et al., 2026). Ketiga sumber ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil lebih tepat dipahami sebagai perbedaan konteks pengamatan daripada kontradiksi yang tak terdamaikan. Kehati-hatian serupa berlaku bagi angka resmi: turunnya penduduk miskin dari 23,36 juta jiwa menjadi 22,93 juta jiwa merupakan kabar baik, tetapi belum otomatis berarti membaiknya mutu pekerjaan dan kecukupan pendapatan.

Faktor Penyebab dan Dampak

Dari sisi pengangguran, terdapat empat tekanan utama. Angkatan kerja tumbuh melampaui penciptaan lapangan kerja, kualifikasi lulusan belum sesuai kebutuhan industri, otomasi menggantikan pekerjaan rutin, dan guncangan ekonomi seperti resesi serta pandemi menekan permintaan tenaga kerja. Literatur mendukung pemetaan ini. Pertumbuhan penduduk berkorelasi signifikan dengan pengangguran terbuka, sedangkan pertumbuhan ekonomi menekannya (Ulya et al., 2025). *Skills mismatch* dan sempitnya penyerapan sektor formal menjelaskan tingginya pengangguran pemuda, yang di Kota Medan mencapai 21,4 persen pada 2024 dibandingkan 18,7 persen secara nasional. Krisis ekonomi dan globalisasi turut memperkuat keterkaitan pengangguran dan kemiskinan (Nurhikm & Riofita, 2026). Penyebab kemiskinan lebih berlapis. Faktornya dapat dikelompokkan ke dalam kapasitas manusia, pasar kerja dan pendapatan, struktur dan ketimpangan, serta kerentanan rumah tangga. Faktor fluktuatif seperti inflasi, PHK, bencana, dan kenaikan harga pangan berinteraksi dengan faktor struktural berupa kesenjangan pendidikan, infrastruktur, akses modal, dan wilayah.

Telaah terbaru memperlihatkan bahwa penyebab pengangguran berbeda menurut jenjang pendidikan, sehingga satu resep kebijakan tidak memadai. Penelitian kualitatif komparatif terhadap 16 pemuda berusia 16–30 tahun menemukan bahwa pada lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pengangguran bersumber dari rendahnya pendidikan dan terbatasnya keterampilan. Pada lulusan SMA/SMK, hambatan utamanya ialah ketatnya persaingan dan minimnya pengalaman kerja. Pada lulusan sarjana, tekanan berasal dari persaingan, tuntutan pengalaman, dan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja (Dewi et al., 2026). Dengan demikian, *skills mismatch* bukan satu-satunya penyebab, melainkan salah satu dari beberapa mekanisme yang bekerja pada tingkat pendidikan yang berbeda. Pemetaan empat tekanan utama pada paragraf di atas karenanya perlu dibaca secara berlapis menurut karakter angkatan kerjanya.

Ketidaksesuaian itu juga terukur pada data nasional. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, di antara pekerja berpendidikan menengah dan tinggi, 14,58 persen mengalami *vertical mismatch* saja, 31,73 persen mengalami *horizontal mismatch* saja, dan 25,24 persen mengalami keduanya sekaligus atau *real mismatch* (Pyansahcilia & Handayani, 2024). Besaran itu menunjukkan bahwa ketidakcocokan bidang pendidikan dengan bidang pekerjaan lebih umum daripada ketidakcocokan jenjang. Konsekuensinya terasa pada pendapatan, sebab pekerja dengan *horizontal mismatch* saja maupun *real mismatch* menerima *wage penalty*, dan pola pengaruhnya berbeda pada tiap tingkat keahlian menurut klasifikasi ISCO-08 (Pyansahcilia & Handayani, 2024). Artinya, ketidaksesuaian keterampilan tidak hanya memperpanjang masa mencari kerja, tetapi juga menekan pendapatan pekerja yang sudah terserap.

Rendahnya pendidikan juga mengarahkan tenaga kerja ke sektor informal. Wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang lebih rendah cenderung menyalurkan tenaga kerjanya ke sektor berproduktivitas rendah yang tidak stabil, sehingga rumah tangga lebih rentan terhadap kemiskinan (Wardani & Rachmawati, 2026). Di Nusa Tenggara Timur, besarnya jumlah pekerja informal berhubungan positif dan signifikan dengan kemiskinan. Penulisnya

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menggambarkan kondisi itu sebagai jebakan kemiskinan karena pekerja informal berpendapatan rendah, tidak tetap, dan tanpa jaminan sosial (Perseveranda, 2025). Karena itu, informalitas perlu ditempatkan sebagai salah satu penyebab struktural kemiskinan yang berkelindan dengan pengangguran, bukan sekadar solusi sementara bagi mereka yang tidak terserap sektor formal.

Struktur pekerjaan mandiri memperkuat gejala tersebut. Semakin banyak penduduk yang bekerja berusaha sendiri, kemiskinan cenderung meningkat, karena pekerja jenis ini sering berada di sektor informal dengan penghasilan lebih rendah dan kurang stabil (Sari & Fatimah, 2025). Ketidakpastian penghasilan juga tampak pada rumah tangga petani. Pada desa yang diteliti di Kabupaten Kampar, mayoritas warga berprofesi sebagai petani yang tidak selalu dapat mengandalkan pendapatan harian karena penghasilannya tidak menentu (Prihatin et al., 2024). Dengan demikian, kerentanan tidak hanya dialami pencari kerja, tetapi juga mereka yang bekerja pada usaha kecil dan pertanian dengan penghasilan yang berfluktuasi.

Perbedaan struktur wilayah mempersulit generalisasi penyebab. Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2018–2024 menguji pengangguran, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan penduduk secara bersamaan sebagai faktor kemiskinan, yang dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa penyebab kemiskinan bersifat multifaktor dan bergantung pada konteks lokal (Fitri & Cahyono, 2026). Pembacaan itu sejalan dengan pengelompokan faktor pada paragraf ini, yakni kapasitas manusia, pasar kerja, struktur ketimpangan, dan kerentanan rumah tangga.

Sebagai rangkuman, penyebab pengangguran dan kemiskinan dapat dipetakan pada tiga sisi. Sisi pasokan mencakup kualitas pendidikan, keterampilan, dan pertumbuhan angkatan kerja. Sisi permintaan mencakup daya serap sektor formal dan dinamika ekonomi. Sisi kelembagaan mencakup informalitas, perlindungan pekerja, dan akses layanan dasar. Pemetaan ini membantu pembaca memahami mengapa satu jenis intervensi jarang cukup. Peningkatan keterampilan tanpa lapangan kerja produktif akan menghasilkan pengangguran terdidik, sedangkan penciptaan lapangan kerja tanpa peningkatan keterampilan akan menghasilkan pekerjaan berupah rendah.

Pemetaan tiga sisi tersebut dapat diperjelas dengan contoh dari literatur. Pada sisi pasokan, kajian lintas jenjang pendidikan menunjukkan bahwa lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terkendala rendahnya pendidikan dan keterampilan, sedangkan lulusan sarjana terkendala ketidaksesuaian kompetensi (Dewi et al., 2026). Pada sisi permintaan, korelasi pertumbuhan penduduk dengan pengangguran terbuka menandakan bahwa penyerapan lapangan kerja belum mengimbangi pertambahan angkatan kerja (Ulya et al., 2025). Pada sisi kelembagaan, jebakan kemiskinan pekerja informal di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan penghasilan yang rendah, tidak tetap, dan tanpa jaminan sosial (Perseveranda, 2025). Ketiga sisi ini tidak berdiri sendiri. Pekerja dengan *horizontal mismatch* menerima *wage penalty* (Pyansahcilia & Handayani, 2024), sehingga persoalan pasokan berubah menjadi persoalan pendapatan. Wilayah dengan rata-rata lama sekolah rendah juga cenderung menyalurkan tenaga kerja ke sektor informal (Wardani & Rachmawati, 2026), sehingga kelemahan pasokan memperkuat kelemahan kelembagaan. Pola saling kait ini menjelaskan mengapa intervensi pada satu sisi saja memberi hasil terbatas.

Rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya layanan kesehatan, minimnya lapangan kerja, kondisi geografis terisolasi, krisis 1997, dan turunnya konsumsi domestik terbukti memperburuk keadaan (Sesmita et al., 2025). Kesehatan, ketimpangan pendapatan, dan IPM juga ikut menentukan tingkat kemiskinan. Sebaran spasialnya timpang: kemiskinan perdesaan di Maluku–Papua mencapai 25,53 persen, Bali–Nusa Tenggara 15,56 persen, dan Sulawesi 11,36 persen pada September 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026). Dampaknya menjalar ke banyak aspek kehidupan. Terdapat enam akibat utama: terhambatnya pendidikan, terbatasnya layanan kesehatan, kerawanan pangan dan gizi termasuk risiko *stunting*, menurunnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan antargenerasi, dan melebarnya kesenjangan wilayah. Tekanan ekonomi juga memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan kriminalitas. Tekanan tersebut melemahkan pula daya beli dan peluang pendidikan. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 hanya Rp669.235 per kapita per bulan. Pada ambang setipis itu, guncangan kecil pada pendapatan sudah cukup menjatuhkan rumah tangga rentan ke bawah garis kemiskinan.

Dampak tersebut bersifat kumulatif karena bekerja melalui rumah tangga dan wilayah sekaligus. Pada tingkat rumah tangga, pendapatan rendah membatasi akses terhadap pendidikan, dan keterbatasan itu terasa sejak dini. Sebagian lulusan sekolah dasar yang diwawancarai pada kajian pemuda tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya orang tua, lalu bekerja sebagai pekerja harian lepas dengan kesempatan kerja yang terbatas (Dewi et al., 2026). Rantai ini memperlihatkan bagaimana kemiskinan orang tua berpindah menjadi rendahnya

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

modal manusia anak, yang pada gilirannya membatasi pendapatan mereka di masa dewasa. Inilah wujud konkret dari kemiskinan antargenerasi yang disebut pada paragraf di atas.

Pada pekerja yang sudah terserap pun, dampak ekonominya tetap terasa. Pekerja yang bidang pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang pendidikannya menerima penalti upah (Pyansahcilia & Handayani, 2024). Penalti pendapatan seperti ini mengikis kemampuan rumah tangga untuk menabung, berinvestasi pada pendidikan anak, dan menghadapi guncangan, sehingga menjaga mereka tetap berada di sekitar garis kemiskinan. Kenaikan upah nominal pun tidak otomatis menolong kelompok informal. Penelitian di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa kenaikan upah pekerja informal belum menurunkan kemiskinan secara nyata tanpa peningkatan produktivitas dan perlindungan sosial (Perseveranda, 2025).

Pada tingkat wilayah, ketimpangan kualitas manusia berpotensi memperlebar jurang antardaerah. Karena IPM memperkuat pengaruh pengangguran dan upah terhadap kemiskinan, perbedaan IPM antardaerah dapat membuat dampak pengangguran yang sama terasa tidak seragam di tiap wilayah (Samosir et al., 2025). Akumulasi kesenjangan semacam itu memperkuat pandangan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan karena itu tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah (Deswari et al., 2023). Dampak pengangguran dan kemiskinan dengan demikian merambat dari pendapatan rumah tangga ke pendidikan, gizi, produktivitas, dan kesenjangan antarwilayah. Jalur-jalur itu saling memperkuat sehingga memerlukan penanganan yang terpadu.

Pemetaan tiga sisi tersebut dapat diperjelas dengan contoh dari literatur. Pada sisi pasokan, kajian lintas jenjang pendidikan menunjukkan bahwa lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terkendala rendahnya pendidikan dan keterampilan, sedangkan lulusan sarjana terkendala ketidaksesuaian kompetensi (Dewi et al., 2026). Pada sisi permintaan, korelasi pertumbuhan penduduk dengan pengangguran terbuka menandakan bahwa penyerapan lapangan kerja belum mengimbangi pertambahan angkatan kerja (Ulya et al., 2025). Pada sisi kelembagaan, jebakan kemiskinan pekerja informal di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan penghasilan yang rendah, tidak tetap, dan tanpa jaminan sosial (Perseveranda, 2025). Ketiga sisi ini tidak berdiri sendiri. Pekerja dengan *horizontal mismatch* menerima *wage penalty* (Pyansahcilia & Handayani, 2024), sehingga persoalan pasokan berubah menjadi persoalan pendapatan. Wilayah dengan rata-rata lama sekolah rendah juga cenderung menyalurkan tenaga kerja ke sektor informal (Wardani & Rachmawati, 2026), sehingga kelemahan pasokan memperkuat kelemahan kelembagaan. Pola saling kait ini menjelaskan mengapa intervensi pada satu sisi saja memberi hasil terbatas.

Perbedaan perkotaan dan perdesaan tidak hanya tampak pada besaran angka kemiskinan, tetapi juga pada cara dampaknya dirasakan. Kemiskinan perdesaan sebesar 10,67 persen pada Maret 2026, dibandingkan 6,34 persen di perkotaan, menunjukkan bahwa beban terbesar masih berada di desa. Di perdesaan, pendapatan bersih pekerja bebas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan di perkotaan tidak, karena akses terhadap fasilitas sosial dan ekonomi membantu penduduk kota menanggung biaya hidup (Sari & Fatimah, 2025). Guncangan pendapatan yang sama dengan demikian dapat berakibat lebih berat pada rumah tangga yang jauh dari layanan dasar. Ketimpangan antarwilayah tampak pula pada kemiskinan perdesaan di Maluku–Papua yang mencapai 25,53 persen pada September 2025, jauh di atas Sulawesi yang sebesar 11,36 persen (Badan Pusat Statistik, 2026). Perbedaan ini menandakan bahwa kebijakan nasional yang seragam berisiko tidak menyentuh kantong kemiskinan terdalam. Di sisi lain, dana desa dan IPM sama-sama berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah (Prastowo & Saputra, 2026), yang mengisyaratkan bahwa penguatan kapasitas desa dan kualitas manusia merupakan jalur penurunan yang layak dipertimbangkan. Rancangan strategi karenanya perlu berangkat dari perbedaan intensitas dampak menurut wilayah.

Strategi Penanganan Terintegrasi

Akar masalah yang berlapis menuntut penanganan lebih dari sekadar bantuan jangka pendek, yang selama ini dinilai belum mampu memutus kemiskinan. Respons yang tepat disusun menurut jangka waktu. Pada 0–2 tahun, prioritasnya adalah *job matching* berbasis kompetensi, pelatihan vokasi bersertifikasi, magang berbayar, padat karya, dan bantuan sementara. Pada 3–5 tahun, program diarahkan ke rekening keterampilan individu, jaminan magang, pusat kerja digital desa, penitipan anak bersubsidi, program graduasi kemiskinan, dan dana investasi sosial produktif. Untuk jangka lebih dari lima tahun, fokusnya pemerataan pendidikan, lapangan kerja formal yang produktif, pemerataan investasi, transformasi ekonomi perdesaan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi jembatan antara pelatihan dan pekerjaan. Sebagai

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tulang punggung ekonomi, UMKM berpotensi menekan kemiskinan, tetapi kinerjanya ditentukan oleh akses modal, pelatihan keterampilan, dan dukungan kebijakan (Sitepu, 2023).

Evaluasi terhadap program yang sudah berjalan memberi pelajaran penting bagi perancangan strategi tersebut. Kajian tingkat desa yang meninjau pemanfaatan bantuan pelatihan dan pemberian insentif Kartu Prakerja menyimpulkan bahwa pelatihan belum efektif memberi dampak pada produktivitas peserta (Taufiq & Akhmadi, 2022). Hasil ini tidak berarti pelatihan keterampilan harus ditinggalkan. Ia menunjukkan bahwa pelatihan perlu dirancang agar tersambung dengan kebutuhan pekerjaan nyata dan didukung pendampingan setelah pelatihan. Gagasan sertifikasi, magang berbayar, dan *job matching* berbasis kompetensi pada strategi jangka pendek di atas sebaiknya disertai ukuran keberhasilan berupa penempatan kerja dan peningkatan pendapatan, bukan sekadar jumlah peserta pelatihan.

Dimensi pendidikan perlu dilibatkan secara lebih sistematis. Penelitian tentang penyebab pengangguran pada berbagai jenjang pendidikan merekomendasikan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan dunia kerja, dan penguatan program magang (Dewi et al., 2026). Rekomendasi ini selaras dengan temuan bahwa ketidakcocokan bidang pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan penalti upah, sehingga penyelarasan atau *link and match* antara pendidikan dan pasar kerja berpotensi meningkatkan pendapatan sekaligus menurunkan risiko pengangguran (Pyansahcilia & Handayani, 2024). Hubungan ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan tidak dapat dirancang secara terpisah.

Strategi bagi pekerja informal memerlukan pendekatan tersendiri karena kelompok ini sulit dijangkau kebijakan upah minimum. Penelitian di Nusa Tenggara Timur merekomendasikan pelatihan keterampilan, akses permodalan, legalisasi usaha mikro, dan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal (Perseveranda, 2025). Kajian di Jawa Timur menambahkan bahwa upah minimum akan berdampak lebih besar jika dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, dan pemberdayaan sektor informal (Wardani & Rachmawati, 2026). Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja informal harus dibangun melalui beberapa instrumen sekaligus, bukan melalui satu kebijakan tunggal.

Penguatan UMKM yang telah diuraikan di atas perlu memperhatikan kerentanan pelaku usaha yang bekerja sendiri. Penduduk yang berusaha sendiri umumnya berada di sektor informal dengan penghasilan yang rendah dan tidak stabil, sehingga semakin besar jumlahnya semakin besar pula tekanan terhadap kemiskinan (Sari & Fatimah, 2025). Dukungan bagi usaha mikro karenanya tidak cukup berupa pembukaan akses modal, tetapi juga pendampingan agar usaha mampu bertahan. Pengembangan kewirausahaan yang diusulkan bagi lulusan muda, agar mereka tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga pencipta peluang usaha, memerlukan dukungan serupa (Dewi et al., 2026). Ukuran keberhasilan penguatan UMKM semestinya bukan hanya jumlah usaha yang berdiri, melainkan peningkatan pendapatan bersih dan kemantapan pekerjaan yang dihasilkannya.

Kebijakan yang tepat sasaran dan produktif juga dipandang membantu masyarakat keluar dari jebakan kemiskinan secara berkelanjutan (Aulia & Dewi, 2025). Pandangan ini sejalan dengan rekomendasi agar kebijakan lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan (Samosir et al., 2025). Ketepatan sasaran menuntut data yang memadai tentang siapa yang miskin, bekerja di sektor apa, dan hambatan apa yang dihadapinya. Mekanisme pendataan keluarga pada strategi integrasi kota dan desa dengan demikian bukan sekadar urusan administratif, melainkan prasyarat efektivitas seluruh program.

Sebagai penutup subbagian ini, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang perlu dibaca sebagai satu rangkaian. Pelatihan dan penempatan kerja pada jangka pendek hanya akan bermakna bila tersedia pekerjaan produktif pada jangka menengah. Pekerjaan produktif itu pada gilirannya bergantung pada perbaikan pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial pada jangka panjang. Keterkaitan antartahap ini yang membedakan strategi terintegrasi dari kumpulan program yang berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah dituntut berperan sebagai fasilitator melalui pemberdayaan masyarakat dan sektor padat karya. Investasi perlu dibarengi pembukaan lapangan kerja baru agar pertumbuhan benar-benar terserap (Ulya et al., 2025). Kebijakan terpadu yang menggabungkan penciptaan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan sosial perlu memanfaatkan keunggulan lokal, misalnya sektor maritim, pertanian, dan digital di Medan (Syaifullah & Siregar, 2026). Bantuan sosial tetap berguna sebagai penyangga masa transisi karena berpengaruh bersama pendidikan dan TPT terhadap kemiskinan. Integrasi kota dan desa dapat diwujudkan melalui

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

empat langkah. Langkah pertama adalah satu keluarga satu jalur kemandirian, mulai dari pendataan, pelatihan, sertifikasi, kerja atau usaha, hingga pendampingan. Langkah kedua adalah insentif rekrutmen berbasis hasil bagi pekerja yang bertahan 6–12 bulan. Langkah ketiga adalah belanja pemerintah yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Langkah keempat adalah pusat kerja produktif tingkat kecamatan. Kota menitikberatkan kecocokan keterampilan dan penyerapan sektor formal, sedangkan desa menitikberatkan UMKM, pertanian bernilai tambah, dan pusat kerja digital. Modal sosial berupa ikatan internal (*bonding*), jembatan jejaring (*bridging*), dan akses kelembagaan (*linking*) memperkuat ketahanan ekonomi. Indeks modal sosial nasional tercatat 72,05, dengan perdesaan (72,68) sedikit di atas perkotaan (71,57).

Modal sosial efektif bila terhubung dengan pendidikan, pelatihan, akses modal, pasar kerja, dan kebijakan pemerintah. Pada konteks perdesaan, instrumen fiskal desa dan bantuan sosial memiliki peran yang dapat diperkuat. Hasil penelitian di Jawa Tengah mengarahkan penggunaan dana desa pada infrastruktur produktif yang menopang ekonomi perdesaan (Prastowo & Saputra, 2026). Penelitian yang sama menekankan pemerataan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan revitalisasi layanan kesehatan dasar (Prastowo & Saputra, 2026). Rekomendasi ini mendukung gagasan pusat kerja digital desa dan transformasi ekonomi perdesaan pada strategi jangka menengah dan panjang. Belanja desa yang diarahkan pada kapasitas produktif dapat menciptakan pekerjaan sekaligus menurunkan beban biaya hidup rumah tangga.

Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai penyangga, tetapi desain dan pelaksanaannya perlu dievaluasi secara berkala. Pada desa yang diteliti di Kabupaten Kampar, bantuan Program Keluarga Harapan semula berupa paket sembako dan kemudian diubah menjadi bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan, dengan tujuan jangka pendek meringankan biaya hidup dan tujuan jangka panjang memutus siklus kemiskinan melalui akses kesehatan dan pendidikan (Prihatin et al., 2024). Karena itu, sebagaimana diingatkan pada studi di Jawa Timur, bantuan sosial berisiko bersifat sementara apabila tidak disertai penciptaan kesempatan kerja produktif (Wardani & Rachmawati, 2026). Jalur graduasi yang telah diusulkan pada strategi jangka menengah di atas, yaitu menghubungkan penerima bantuan dengan pelatihan, modal usaha, dan pekerjaan, sejalan dengan bukti tersebut.

Kerentanan terhadap guncangan menegaskan perlunya perlindungan sosial yang adaptif. Penelitian pada enam provinsi di Pulau Jawa dengan pendekatan *random effect model* memperlakukan pandemi sebagai variabel tersendiri, sehingga dampak guncangan terhadap kemiskinan dapat dipisahkan dari faktor lain (Dakhilullah, 2023). Praktik ini layak diadopsi dalam evaluasi kebijakan agar efek guncangan tidak keliru dibaca sebagai kegagalan program. Dengan memanfaatkan data keluarga yang terpadu, pemerintah dapat memperluas cakupan bantuan sementara secara cepat ketika terjadi guncangan, lalu mengarahkan penerima ke jalur kemandirian setelah kondisi pulih.

Terakhir, kebijakan perlu dipilih dengan memperhatikan bauran variabel yang bekerja pada tiap wilayah. Hasil estimasi yang menunjukkan bahwa pengangguran, upah minimum, dan produk domestik regional bruto berpengaruh secara bersama-sama menegaskan bahwa tidak ada satu instrumen yang cukup berdiri sendiri (Syahputri & Fisabilillah, 2022). Pemerintah daerah perlu memadukan data kemiskinan, struktur lapangan usaha, dan profil ketenagakerjaan setempat sebelum memilih bauran kebijakan. Dengan cara itu, sumber daya diarahkan kepada instrumen yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Keberhasilan strategi terintegrasi pada akhirnya bergantung pada kemampuan menilai hasilnya. Indikator berbasis jumlah, seperti banyaknya peserta pelatihan atau usaha yang berdiri, tidak cukup menggambarkan perubahan nyata pada kesejahteraan. Evaluasi pelatihan Kartu Prakerja di tingkat desa yang belum menemukan peningkatan produktivitas peserta (Taufiq & Akhmadi, 2022) mengingatkan bahwa partisipasi tidak sama dengan hasil. Sistem pemantauan (*monitoring*) karena itu sebaiknya memuat tiga kelompok indikator. Kelompok pertama menyangkut penempatan dan ketahanan kerja, misalnya proporsi peserta yang bekerja dan bertahan pada jangka waktu tertentu. Kelompok kedua menyangkut kecukupan pendapatan, yakni perubahan pendapatan bersih dibandingkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Kelompok ketiga menyangkut akses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menentukan apakah perbaikan pendapatan bersifat berkelanjutan. Pengukuran juga perlu membedakan wilayah perkotaan dan perdesaan agar kemajuan di kota tidak menutupi ketertinggalan di desa. Evaluasi yang memisahkan pengaruh guncangan dari pengaruh program, sebagaimana dicontohkan dengan penempatan pandemi sebagai variabel tersendiri (Dakhilullah, 2023), mencegah program dinilai gagal semata karena kondisi eksternal. Dengan perangkat evaluasi demikian, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dapat dikoreksi secara bertahap.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keterkaitan, penyebab, dampak, dan strategi penanganan pengangguran serta kemiskinan di Indonesia dirangkum pada Tabel 1 agar alur analisis dalam pembahasan ini terlihat utuh.

Tabel 1. Keterkaitan, Penyebab, Dampak, dan Strategi Penanganan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia

Aspek	Pengangguran	Kemiskinan
Keterkaitan	Kehilangan pekerjaan menurunkan pendapatan dan daya beli. Kausalitas berlangsung dua arah.	Keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan mempersempit peluang kerja layak.
Penyebab	Pertumbuhan penduduk, *skills mismatch*, serapan formal terbatas, otomasi, krisis ekonomi.	Pendidikan dan kesehatan terbatas, minim lapangan kerja, wilayah terisolasi, ketimpangan, IPM rendah.
Dampak	Pendapatan hilang, pengangguran pemuda tinggi, produktivitas menurun.	Pendidikan terhambat, risiko *stunting*, kemiskinan antargenerasi, kriminalitas meningkat.
Strategi jangka pendek	*Job matching*, pelatihan vokasi, magang berbayar, padat karya.	Bantuan sementara sebagai penyangga transisi.
Strategi jangka menengah	Rekening keterampilan, jaminan magang, penguatan UMKM.	Pusat kerja digital desa, penitipan anak, program graduasi.
Strategi jangka panjang	Lapangan kerja formal produktif dan investasi penyerap tenaga kerja.	Pemerataan pendidikan dan kesehatan, transformasi ekonomi perdesaan.

Sumber: diolah peneliti berdasarkan studi literatur (Syaifullah et al., 2026; Ulya et al., 2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan membentuk rantai sebab-akibat yang saling bertaut. Penanganannya perlu bertahap dan terpadu, mulai dari perlindungan jangka pendek hingga transformasi struktural jangka panjang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia terbukti saling memengaruhi dalam siklus dua arah yang saling menguatkan. Hilangnya pekerjaan menggerus pendapatan rumah tangga, sedangkan keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan mempersempit akses terhadap pekerjaan yang layak. Kekuatan hubungan ini tidak seragam, melainkan bergantung pada mutu modal manusia, tingkat informalitas pasar kerja, intensitas guncangan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar di tiap wilayah. Penyebabnya berlapis. Pertumbuhan angkatan kerja yang melampaui penciptaan lapangan kerja, ketidaksesuaian keterampilan (*skills mismatch*), otomasi, guncangan ekonomi, dan ketimpangan antardaerah bekerja secara bersamaan. Faktor yang bersifat fluktuatif, seperti inflasi dan pemutusan hubungan kerja, berinteraksi dengan faktor struktural berupa kesenjangan pendidikan, infrastruktur, dan akses permodalan. Dampaknya merambat ke pendidikan, gizi, kualitas sumber daya manusia, hingga kemiskinan yang diwariskan antargenerasi. Karena persoalannya tidak bersumber pada satu faktor, strategi penanganan perlu disusun secara terpadu dan berjenjang. Pada jangka pendek, pelatihan vokasi, *job matching*, dan bantuan sementara menjadi penyangga. Pada jangka menengah, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta jalur graduasi bagi penerima bantuan mengarahkan masyarakat menuju kemandirian. Pada jangka panjang, pemerataan pendidikan dan kesehatan serta perluasan lapangan kerja formal yang produktif menjadi sasaran utamanya. Temuan ini berimplikasi pada cara menilai keberhasilan kebijakan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum memadai sebagai satu-satunya ukuran, sebab banyak rumah tangga miskin tetap bekerja pada pekerjaan informal berpenghasilan rendah. Pengukuran yang hanya bertumpu pada TPT juga berisiko membuat kenaikan kemiskinan pascaguncangan luput dari pemantauan. Oleh sebab itu, mutu pekerjaan dan kecukupan pendapatan sebaiknya dijadikan indikator utama, dengan rancangan program yang membedakan karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan. Pemerintah disarankan menyatukan data keluarga, pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan usaha dalam satu mekanisme yang saling terhubung agar sasaran program tepat dan hasilnya terukur. Penelitian selanjutnya dianjurkan menguji kerangka ini secara empiris dengan memanfaatkan data mikro rumah tangga.

Reference

1. Alamsyah, S. R., Sriyana, J., Hakim, A., & Sidiq, S. (2026). Bridging inequality: How macroeconomic factors, social assistance, and zakat shape urban and rural poverty in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning, 21*(6), 2677–2686.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2. Aliyah, T., & Bahtiar, M. Y. (2025). *Pengaruh Bantuan Sosial , Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *05*(Tumangkeng 2019), 491–508.
3. Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). Pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, *4*(2), 117–133.
4. Aulia, N. P., & Dewi, D. D. (2025). Pengaruh Pekerja Informal, IPM, dan Kredit BPR terhadap Kemiskinan di Indonesia: Analisis Data Panel. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *6*(12). https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/download/8833/2122/21632
5. Badan Pusat Statistik. (2026). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen (Berita Resmi Statistik No. 19/02/Th. XXIX). *BPS*.
6. Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2022). Systematic approaches to a successful literature review (3rd ed.). In *Sage Publications*.
7. Cindana, H., & Sa, N. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan PDB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(2), 420–431. https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/3604
8. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). *SAGE Publications*.
9. Dakhilullah, M. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *1*(1), 60–75. https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i1.239
10. Deswari, P. N. N., Jayawarsa, A. A. K., & Wulandari, I. G. A. A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Jumlah Penduduk yang Menganggur Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2020. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, *6*(2), 63–71. https://doi.org/10.22225/wedj.6.2.2023.63-71
11. Dewi, A. A., Anggreani, A. P., Elsyarif, A. L., Khasanah, A. U., & Farliana, N. (2026). Analisis Komparatif Faktor Penyebab Pengangguran Pada Lulusan SD, SMP, SMA, Dan Sarjana Usia Produktif Muda. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(02), 211–217. https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/44965/25131/163808
12. Fitri, D. I., & Cahyono, H. (2026). Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2024. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *26*(1), 112–128. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/download/30964/pdf
13. Nurhikm, D., & Riofita, H. (2026). Hubungan Pengangguran Dengan Tingkat Kemiskinan Masyarakat. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *12*. https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.15923
14. Perseveranda, M. E. (2025). Pekerja sektor informal sebagai determinan jebakan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *7*(3), 47–64. https://doi.org/10.32938/jep.v7i3.10320
15. Prastowo, P., & Saputra, Z. M. A. (2026). Analisis pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembanguan Manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, *5*(1), 163–171. https://doi.org/10.20885/JKEK.vol5.iss1.art16
16. Prihatin, P. S., Munir, A., & Saudi, A. (2024). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. *Jurnal Trias Politika*, *8*(2), 283–291. https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.5864
17. Putranto, F. G. F., & Natalia, C. (2024). Closing the Gap Between Education and Labor Market Requirement : Do Vocational Education Matter ? *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *5*(3), 181–191. https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.614
18. Pyansahcilia, J. E., & Handayani, D. (2024). Pengaruh Real Mismatch terhadap Upah Pekerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kependudukan Dan Keluarga*, *3*(1), 5. https://scholarhub.ui.ac.id/jekk/vol3/iss1/5
19. Resina, D., Kamarni, N., & Putra, F. P. (2023). Program Keluarga Harapan : Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia ? Household Level Evidence from Districts / Cities in Indonesia on 2019 Program Keluarga Harapan : Dapatkah Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan di Indonesi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(225), 277–289. https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.6126.Info
20. Samosir, S., Aritonang, K. B., Siregar, M., Siregar, I. A., & Sitepu, Y. E. (2025). Pengaruh Pengangguran Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada 34 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, *13*(2), 1–8. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ekodik/article/view/69914
21. Sari, N., & Fatimah, A. (2025). Pengaruh Keberadaan Pekerja Bebas (Casual Worker) Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *7*(1), 19–26. https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/download/282/128
22. Sesmita, R., Nolya, W. T., Heriyandini, Y. M., & Jenita, Y. L. (2025). Faktor Penyebab Pengangguran dan Kemiskinan serta Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara Volume*, *1*, 19–22. https://padangjurnal.com/index.php/menulis/article/view/538
23. Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Registratie*, *5*(2), 87–103. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554 Authors:
24. Sitepu, Y. M. R. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, *1*(2), 99–108. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.321
25. Syahputri, R. K. R., & Fisabilillah, L. W. P. (2022). Pengaruh pengangguran, upah minimum, dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, *2*(2), 169–184. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/download/50990/41819
26. Syaifullah, & Siregar, D. A. F. (2026). Hubungan Timbal Balik Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Siklus Kemiskinan dan Kebijakan Ketenagakerjaan 2010-2024. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *4*(1), 1584–1589.
27. Taufiq, I., & Akhmadi, M. H. (2022). The effectiveness of the pre-employment card program on increasing recipient productivity. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, *7*(1), 37–50. https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v7i1.y2022.p37-50
28. Ulya, S. K., Rindiani, R., Masitoh, G., Oktaviani, C. D., & Rezola, A. R. (2025). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *5*(3). https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2171
29. Wardani, A. K., & Rachmawati, L. (2026). Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, *6*(2), 192–212. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/download/76196/57114/222131
30. Zaqiah, A., Triani, M., & Yeni, I. (2023). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *5*(3), 33.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14541
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)